

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI
PASAR BAMBU KUNING KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tesis

Oleh

DINDA TAMARANI

NPM 2226022007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG

OLEH

DINDA TAMARANI

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, estetik, dan terorganisasi. Kebijakan ini bertujuan mengatasi persoalan klasik seperti kemacetan, kesemrawutan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam dimensi utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lokasi relokasi serta aktivitas pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi standar dan tujuan kebijakan, terdapat keselarasan antara tujuan dan peraturan, namun belum diterjemahkan secara rinci dalam strategi pelaksanaan teknis di lapangan. Pada dimensi sumber daya, terdapat dukungan sarana prasarana dari pemerintah, tetapi belum ditunjang dengan alokasi anggaran operasional dan sumber daya manusia yang memadai. Dimensi karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang formal, namun minim dalam kapasitas teknis dan koordinasi lintas instansi. Dimensi komunikasi antarorganisasi mengalami hambatan serius, terutama komunikasi vertikal dengan para PKL yang tidak berjalan efektif dan cenderung bersifat satu arah. Pada dimensi disposisi pelaksana, ditemukan adanya komitmen petugas lapangan, namun tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap urgensi pendekatan partisipatif. Terakhir, pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD membantu menjaga keberlanjutan kebijakan, namun secara sosial-ekonomi kebijakan ini belum menjamin keberlanjutan pendapatan para pedagang yang direlokasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima, Pasar Bambu Kuning

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF STREET VENDOR RELOCATION
POLICY AT BAMBU KUNING MARKET
BANDAR LAMPUNG CITY**

By
DINDA TAMARANI

The relocation of street vendors (PKL) at Bambu Kuning Market in Bandar Lampung City was carried out as part of the government's effort to create a more orderly, aesthetic, and organized market environment. This policy aims to address longstanding issues such as traffic congestion, disorder, and the inappropriate use of public spaces. This study analyzes the implementation of the street vendor relocation policy using the Van Meter and Van Horn implementation model, which includes six key dimensions: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, disposition of implementers, and the social, economic, and political environment. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and direct observation of relocation sites and vendor activities. The findings show that in the dimension of policy standards and objectives, there is alignment between goals and regulations, but these have not yet been translated into detailed technical implementation strategies on the ground. In terms of resources, there is infrastructural support from the government; however, it is not adequately backed by operational budget allocations and sufficient human resources. The organizational characteristics dimension reveals the existence of a formal institutional structure, but with limited technical capacity and weak inter-agency coordination. The communication dimension faces significant barriers, particularly in vertical communication with the vendors, which remains ineffective and tends to be one-directional. In the disposition of implementers, while there is commitment from field officers, it is not accompanied by a comprehensive understanding of the importance of participatory approaches. Finally, in the social, economic, and political environment dimension, political support from the local government and the Regional House of Representatives (DPRD) helps maintain policy continuity; however, from a socio-economic perspective, the policy has yet to ensure the sustainability of income for the relocated vendors.

Keywords : Public Policy Implementation, Street Vendors, Bambu Kuning Market

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU
KUNING KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dinda Tamarani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **226021007**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**
NIP. 1960041619 8603 2002 NIP. 1978043020 0812 1001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

A blue ink signature, likely belonging to Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



Penguji Bukan Pembimbing: : **Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



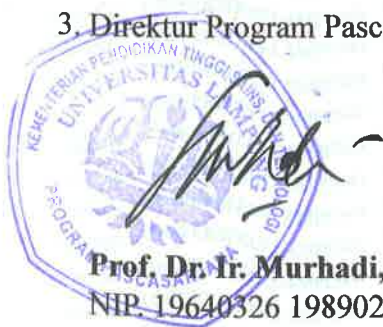
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821-200003 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: **05 Agustus 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAKINTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. *Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.*
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Dinda Tamarani
NPM 2226021007

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Dinda Tamarani, tempat tanggal lahir di Way Kanan, 28 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Sudarno S.Pd., MM dan Ibu Aminah, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2004 di Taman kanak-kanak Raden Intan. Melanjutkan jenjang Sekolah Dasar (SD) negeri Karang Umpu hingga tahun 2011 dan melanjutkan ke Sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 01 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013 – 2016 di SMA S Al-Kautsar Bandar Lampung. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saat ini, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Lampung dengan program studi Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Manajemen Pemerintahan.

Dengan pendidikan sebelumnya Ilmu Pemerintahan diharapkan Hal ini diperkuat dengan studi lanjutan yang sedang penulis tempuh pada Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok yang luar biasa
dalam hidup saya Orangtua Tercinta*

H. Sudarno, S.Pd., MM dan Hj. Aminah, S.Pd

Kakak adikku Tercinta

Nanda Mustika Rani, A.md,Keb dan Amanda Putri Kinasih

Suamiku Tersayang

Ahmad Jundani,S.E

Anakku Tersayang dan Terkasih

Annisya Naira Junda dan Darissa Najiha Junda

*Terima kasih atas doa, dukungan serta semangat yang diberikan
kepadaku untuk menyelesaikan tesis ini, semoga ini menjadi wujud
baktiku untuk membuat kalian bangga dan semoga Allah senantiasa
membalas kebaikan kalian.*

Serta Almamaterku tercinta

Universitas Lampung (UNILA)

MOTTO

— Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan||
(QS. Al-Naim 53: ayat 39)

—Majukan Perempuan dengan pendidikan agar mereka merdeka —

(H.R Rasuna Said)

— Kalau Mimpi tidak membuatmu takut, berarti
 mimpi belum cukup besar‘

(Najwa Shihab)

—Tetap menyala walau apinya kecil sekali, tetap berdiri
 kokoh walau badainya besar sekali. Sebab, yang benar-
 benar kuat bukanlah yang tidak pernah goyah, melainkan
 yang terus bertahan meski hampir padam||

(Dinda Tamarani)

SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam tesis ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhardi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Terima kasih atas berbagai masukan dan saran yang ibu sampaikan sehingga memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

tesis ini. Semoga Allah

SWT melancarkan segala urusan Ibu dan Ibu selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;

6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan proses bimbingan tesis dari awal sampai terselesaikannya tesis ini, yang telah memberikan waktu luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian tesis dengan baik, selalu memberikan semangat dalam proses pembimbingan. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak sehat selalu dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya;
7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.sos., M. IP. sebagai Dosen Pembimbing dua yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat serta saran, baik tentang perkuliahan maupun tentang hal lainnya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dan bapak selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
8. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku dosen penguji penulis yang telah sangat banyak memberikan masukan yang membangun serta dengan sabar memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi;
10. Kedua orangtua tercinta, Ayah H. Sudarno, S.Pd., MM dan Ibuku Hj. Aminah, S.Pd yang selalu bertanya kapan lulus, dan yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk melanjutkan jenjang magister ini
.terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan serta doa,

cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi dan segalanya sehingga penulis sampai di titik ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan membalas seluruh kebaikan dan cinta kasih kalian;

11. Kakak adikku tersayang Nanda Mustika Rani dan Amanda Putri Kinasih, yang senantiasa selalu menjadi pendengar yang baik serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusanmu, sukses dalam segala hal.
12. Suamiku Ahmad Jundani yang mau bekerja sama dan meluangkan waktu untuk kebersamai penulis dalam proses penulisan tesis ini, setia menjadi pendengar yang baik serta selalu memberikan semangat tak putus demi selesainya tesis ini, semoga Allah panjangkan umurmu dan berikan keberkahan dalam hidupmu.
13. Anak-anaku Annisya dan Darissa yang sudah banyak pengertiannya selama ini, terima kasih sudah kebersamai mama dalam proses awal kuliah hingga akhir, serta cinta kasih yang selalu menjadi motivasi mama menyelesaikan tesis ini, maaf atas banyak kekurangan semoga Allah selalu melindungi kita;
14. Sahabatku Humaira Annisya, Dedemas Febrianti, Fauzi Rahmi, Restu Ana Puari, Bella Lesta, Mevita Inestia, Bela Kharisma dan Rahmania Tisandi yang sudah selalu mebebrikan semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam proses kuliah hingga proses tesis ini;
15. Terima kasih juga Kepada Dinda Tamarani terimakasih telah berjuang menyelesaikan yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dan menerima keadaan, dengan kegiatan mengurus dua anak yang luar biasa menyita waktu, tenaga dan fikiran semoga Allah kelak menjadikan ilmu di perkuliaan menjadi ilmu yang berguna dan senantiasa berkah.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat

dalam proses penyelesaian tesis ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini. Akhir kata semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2025

Penulis,

Dinda Tamarani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 15
2.1. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.1.1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.1.2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan	16
2.1.3. Model Implementasi Kebijakan	23
2.2. Tinjauan Relokasi Pasar.....	32
2.2.1. Pengertian Relokasi Pasar	32
2.2.2. Faktor Penentu Pemilihan Lokasi Perekonomian.....	33
2.2.3. Kendala Relokasi Pasar	35
2.2.4. Tujuan Relokasi Pasar	35
2.3. Tinjauan Pedagang Kaki Lima.....	35
2.4. Kerangka Berpikir.....	36

III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Tipe Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian	39
3.3. Penentuan Informan	42
3.4. Sumber Data	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Teknik Pengolahan Data	46
3.7. Teknik Analisis Data	47
3.8. Teknik Validasi dan Keabsahan Data.....	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Gambaran Umum	52
4.1.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	52
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.....	53
4.1.3. Gambaran Pasar Bambu Kuning.....	55
4.1.4. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima	58
4.2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	60
4.3. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan	65
4.3.1. Pemahaman Pelaksanaan terhadap Standar dan Tujuan Kebijakan	65
4.3.2. Kejelasan Penjelasan Standar dan Tujuan Kebijakan.....	67
4.3.3. Kesesuaian Standar dan Tujuan Kebijakan dengan Kondisi Sosial Budaya	68
4.4. Sumber Daya	74
4.4.1. Ketersediaan Anggaran.....	74
4.4.2. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja	75
4.4.3. Peralatan dan Teknologi	76
4.4.4. Informasi dan Data Pendukung	77
4.4.5. Distribusi dan Pengelolaan Sumber Daya.....	79
4.5. Karakteristik Organisasi Pelaksana	82
4.5.1. Prosedur Birokrasi	82

4.5.2. Hierarki dan Struktur Organisasi	83
4.5.3. Koordinasi Antar Unit	84
4.5.4. Fleksibilitas Struktur Birokrasi.....	85
4.5.5. Pengelolaan dan Pengawasan Struktur Birokrasi	85
4.6. Disposition (Sikap Pelaksana)	90
4.6.1. Dukungan Terhadap Kebijakan	90
4.6.2. Motivasi Pelaksana.....	92
4.6.3. Komitmen Pelaksana	93
4.6.4. Respon terhdap Perubahan Kebijakan	94
4.6.5. Keamanan Pelaksana untuk Melakukan Perbaikan	95
4.7. Komunikasi.....	97
4.7.1. Kejelasan kebijakan	98
4.7.2. Konsistensi dalam Komunikasi	99
4.7.3. Saluran Komunikasi yang Efektif.....	101
4.7.4. Feedback dari Pelaksana Kebijakan	102
4.7.5. Minimnya Kesalahpahaman dalam Pelaksanaan Kebijakan	103
4.8. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	105
4.8.1. Lingkungan Sosial	105
4.8.2. Lingkungan Ekonomi	106
4.8.3. Lingkungan Politik	107
4.9.Rekomendasi Kebijakan.....	110
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
6.1. Kesimpulan	113
6.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian terdahulu	8
Tabel 2. Derajat Implementability Dari Kebijakan	23
Tabel 3. Informan Penelitian	43
Tabel. 4. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi PKL melalui Wawancara dan Observasi	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Aksi Penolakan Relokasi Oleh PKL Di Pasar Bambu Kuning.....	4
Gambar 2. The Meaning and Relationship of Selected Categories of Plans	19
Gambar 3. <i>A Model of The Policy Implementation Process</i>	23
Gambar 4. <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	24
Gambar 5. <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	25
Gambar 6. A Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn ...	26
Gambar 7. Model Kesesuaian.....	31
Gambar 8. Kerangka Pikir	37
Gambar 9. Peta Lokasi Kota Bandar Lampung	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena ekonomi dan sosial yang melekat dalam kehidupan perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang. Secara global, PKL memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan barang dan jasa yang mudah diakses dan terjangkau (Octaviani et al., 2022). Di negara-negara seperti Thailand, India, dan Meksiko, PKL tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik budaya dan wisata. Di Bangkok, PKL menjadi ikon wisata kuliner yang mendunia, sementara di New Delhi, India, mereka menjajakan makanan khas lokal hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari di berbagai sudut kota.

Keberadaan PKL sering kali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak terpenuhi oleh sektor formal. Urbanisasi yang pesat di negara berkembang mendorong peningkatan jumlah PKL, karena banyak migran dari pedesaan tidak mampu mengakses pekerjaan formal di kota (Rambling, 2020). Mereka memilih sektor informal ini karena lebih fleksibel, membutuhkan modal awal yang kecil, dan tidak memerlukan izin atau regulasi yang rumit. Meski begitu, aktivitas PKL yang tidak terorganisir sering kali menimbulkan konflik dengan tata kelola kota, terutama dalam penggunaan ruang public (Anjasmari & Hasna, 2023). Di Indonesia, PKL memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional. Mereka menjadi penopang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal,

termasuk PKL, menyerap lebih dari 60% angkatan kerja di Indonesia. Dalam konteks ini, PKL tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga menjadi sarana distribusi barang yang cepat dan efisien di kawasan perkotaan.

Istilah "PKL" digunakan untuk menggambarkan pedagang gerobak. Karena ada lima kaki pedagang, istilah ini sering ditafsirkan dengan cara ini. Dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki", yang sebenarnya adalah dua roda dan satu kaki kayu (Rambing, 2020). Sejarah tidak menunjukkan hubungan antara kaki lima dan jumlah kaki dan roda. Pedagang bergerobak yang "mangkal" di trotoar tidak terlalu lama sekitar 1980-an. Sebelumnya, PKL didominasi oleh pedagang pikulan (seperti penjual cendol dan kerak telur) dan gelaran. Sebenarnya, istilah "kaki lima" berasal dari zaman kolonial Belanda. Menurut peraturan pemerintahan saat itu, setiap jalan raya harus memiliki lebar lima kaki, atau sekitar satu setengah meter, untuk jalan kaki. Puluhan tahun kemudian, saat Indonesia sudah merdeka, jalan raya untuk pejalan kaki banyak digunakan oleh para pedagang. Ini dulunya dikenal sebagai pedagang emperan jalan, tetapi sekarang dikenal sebagai pedagang kaki lima, meskipun secara historis seharusnya disebut sebagai pedagang lima kaki.

Pedagang kaki lima dianggap mengganggu pengendara motor dan menggunakan badan jalan dan trotoar di beberapa lokasi (Taime et al., 2021). Selain itu, PKL menggunakan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cucian mereka. Sampah dan air sabun dapat merusak sungai, membunuh ikan dan biota lainnya dan menyebabkan eutrofikasi. Sebaliknya, bisnis kecil (PKL) biasanya menawarkan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih rendah kadang-kadang sangat rendah dibandingkan dengan harga toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan sangat kecil, sehingga sering mengundang pedagang yang ingin memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang-orang dari ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnis di sekitar rumah mereka.

Aktivitas PKL di Indonesia dapat ditemukan di hampir semua kota besar,

seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Mereka berjualan di trotoar, badan jalan, hingga area sekitar pusat perbelanjaan, menjadikan ruang publik sebagai tempat usaha utama. Namun, keberadaan mereka sering kali dianggap mengganggu keteraturan tata kota, seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, menurunkan estetika kota, dan menimbulkan konflik penggunaan ruang (Iscahyono et al., 2023). Pemerintah di berbagai daerah telah berupaya menata PKL melalui regulasi dan kebijakan relokasi, meskipun pelaksanaannya tidak selalu berhasil. Di Yogyakarta, misalnya, kebijakan relokasi PKL di kawasan Malioboro berhasil diterapkan melalui pendekatan partisipatif. Sebaliknya, di Kota Batu, Jawa Timur, relokasi PKL gagal karena lokasi baru dinilai kurang strategis dan fasilitasnya tidak memadai. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan relokasi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memahami kebutuhan PKL dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan.

Provinsi Lampung tepatnya Kota Bandar Lampung adalah pusat ekonomi utama yang menarik banyak PKL untuk beroperasi. Salah satu lokasi dengan konsentrasi PKL tertinggi adalah Pasar Bambu Kuning, yang menjadi pusat perdagangan utama di kota tersebut. Kawasan ini menarik perhatian PKL karena lokasinya yang strategis di pusat kota, dengan arus lalu lintas manusia yang tinggi. Para PKL menawarkan berbagai barang, mulai dari makanan hingga pakaian, yang semuanya tersedia dengan harga terjangkau.

Pasar Bambu Kuning menarik perhatian PKL karena posisinya yang strategis di tengah kota dan tingginya arus lalu lintas manusia. Para PKL memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan area sekitar pasar untuk menawarkan berbagai barang, mulai dari makanan hingga pakaian. Namun, keberadaan mereka menimbulkan berbagai masalah, termasuk:

1. Kemacetan Lalu Lintas: Penggunaan badan jalan untuk berjualan oleh PKL mempersempit ruang lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, mengganggu mobilitas masyarakat.

2. Penurunan Estetika Lingkungan: Penumpukan barang dagangan, limbah, dan tenda-tenda sementara yang tidak tertata menurunkan kualitas visual kawasan.
3. Konflik Penggunaan Ruang Publik: Aktivitas PKL mengurangi aksesibilitas trotoar bagi pejalan kaki, menciptakan ketegangan antara pedagang dan masyarakat umum

Meskipun menimbulkan masalah, keberadaan PKL di Pasar Bambu Kuning juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk menyediakan Barang dengan Harga Terjangkau: PKL membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kontribusi terhadap Ekonomi Lokal: Aktivitas perdagangan mereka menggerakkan roda ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun demikian, manfaat ini sering kali tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap tata ruang dan lingkungan kota. Seperti pada November 2021, terjadi polemik antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Bukit Tinggi terkait rencana relokasi ke lantai 2 dan 3 Pasar Bambu Kuning. Para PKL menolak relokasi tersebut dan menggelar aksi demonstrasi pada 17 November 2021. Penolakan para PKL didasarkan pada pengalaman sebelumnya pada tahun 2008, di mana mereka pernah berdagang di lantai atas Pasar Bambu Kuning namun mengalami kerugian karena minimnya pengunjung. Mereka khawatir kondisi serupa akan terulang jika kembali direlokasi ke lokasi tersebut.

Gambar 1. Aksi Penolakan Relokasi Oleh PKL Di Pasar Bambu Kuning



Sumber: Dokumentasi Sindonews (2021).

Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons penolakan ini dengan meminta pengertian dari para PKL. Pemerintah menjelaskan bahwa relokasi bertujuan untuk menata kota agar lebih indah dan tertib. Pemerintah juga berencana memperbaiki fasilitas di Pasar Bambu Kuning, seperti pendingin ruangan dan eskalator, serta memberikan kompensasi sewa tempat selama tiga bulan kepada para pedagang yang direlokasi. Namun, para PKL tetap bersikukuh menolak relokasi tersebut. Mereka menuntut kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan mereka dan mengizinkan mereka tetap berjualan di lokasi semula. Permasalahan ini mencerminkan tantangan dalam penataan kota yang melibatkan kepentingan pemerintah dan mata pencaharian masyarakat. Diperlukan dialog konstruktif antara kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Untuk menata keberadaan PKL, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tertib, aman, dan nyaman dengan menata aktivitas PKL agar tidak mengganggu fungsi ruang publik. Salah satu strategi yang diatur dalam peraturan ini adalah relokasi PKL ke lokasi yang lebih terorganisir. Namun, pelaksanaan relokasi di Pasar Bambu Kuning menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari para pedagang yang merasa bahwa lokasi baru tidak strategis dan dapat menurunkan pendapatan mereka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning:

1. Ketidakcocokan dengan Regulasi

Aktivitas PKL sering kali tidak sejalan dengan peraturan tata ruang dan ketertiban umum, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tertib, tetapi implementasinya menghadapi tantangan besar di lapangan.

2. Dilema Ekonomi dan Sosial

Upaya untuk menata PKL sering kali dipandang sebagai ancaman

terhadap mata pencaharian mereka, sehingga menciptakan resistensi yang kuat. Dampaknya, pemerintah menghadapi dilema antara menegakkan aturan dan melindungi kelompok ekonomi lemah.

3. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah

Banyak pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung untuk menata PKL secara efektif.

4. Kurangnya Komunikasi dan Partisipasi

Minimnya keterlibatan PKL dalam proses perencanaan kebijakan sering kali membuat mereka merasa kebijakan yang diterapkan tidak berpihak pada kebutuhan mereka.

Pasar Bambu Kuning di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pusat perdagangan yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, khususnya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL di kawasan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dagangan yang terjangkau, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, keberadaan PKL yang menempati trotoar dan badan jalan sering kali menimbulkan masalah, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban umum, dan menurunnya estetika kota.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam upaya menata ulang kawasan ini dan meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan, memutuskan untuk melakukan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning ke tempat yang lebih tertata dan representatif. Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih teratur dan nyaman. Di samping itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pusat kota bagi pengunjung dan wisatawan.

Namun demikian, implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning menghadapi berbagai tantangan. Relokasi sering kali menimbulkan resistensi dari para pedagang karena berbagai alasan, termasuk ketakutan

akan penurunan pendapatan akibat perubahan lokasi yang dianggap kurang strategis, keterbatasan fasilitas di tempat relokasi baru, serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif antara pemerintah dan para PKL. Banyak PKL yang merasa relokasi ini lebih menguntungkan pihak tertentu dan mengabaikan kepentingan mereka sebagai pelaku ekonomi informal yang juga berkontribusi terhadap perekonomian kota. Selain itu, kebijakan relokasi ini juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, pembeli, dan pedagang formal di sekitar area tersebut. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang dan mengimplementasikan relokasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan, seperti PKL.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kajian mengenai implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dampaknya terhadap para PKL dan masyarakat luas. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Identitas (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Siska Praditya, Melinda Putri Pratiwi, Arifah Ratnasari (2022)	Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Malioboro	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima dari strategi relokasi Malioboro. Pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur. Penelitian kualitatif deskriptif adalah desain penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan dampak sosial dan ekonomi dari relokasi terhadap pedagang kaki lima. Keberlanjutan, kenyamanan, dan daya tarik lingkungan Malioboro serta adanya perlindungan bagi PKL merupakan contoh pengaruh sosial. Di sisi lain, penurunan pendapatan pedagang dan meningkatnya persaingan antar pedagang merupakan contoh dampak ekonomi.
2	Putri Dhiya Deyani, Neneng Yani Yuningsih, Yayan Nuryanto (2025)	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Skywalk Cihampelas Tahun 2017-2023	Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan merupakan enam kriteria penilaian kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kebijakan relokasi PKL di Skywalk Cihampelas Kota Bandung. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metodologi yang digunakan, dan data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian Skywalk Cihampelas terhadap kebijakan relokasi masih di bawah standar karena masih ditemukannya permasalahan seperti PKL yang kembali berjualan di trotoar dan ketidakmampuan PKL dalam mengubah perilaku mereka untuk mematuhi peraturan. Standar evaluasi Dunn menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk pengembangan di lima bidang: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan daya tanggap.

No	Identitas (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
3	Sudariyanto & Manggalou (2024)	Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya	Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan relokasi telah menghasilkan perbaikan, termasuk tempat yang lebih higienis dan terorganisir. Hanya 142 dari 251 pedagang yang dipindahkan yang aktif berjualan, dan 43,43% dari mereka tidak merasakan manfaat dari pemindahan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya prihatin dengan keluhan mengenai penurunan pendapatan pasca relokasi dan ingin membuat Serambi Ampel lebih mudah diakses dan menarik bagi wisatawan.
4	Rio Dwi Restianto (Restianto, 2020)	Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo	Studi ini berfokus pada ketepatan kebijakan tersebut, yang telah menghasilkan lebih sedikit PKL di trotoar. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa berbagai instansi telah bekerja sama dengan baik, implementasi kebijakan tersebut masih di bawah standar, dan terdapat masalah dalam hal pemungutan biaya dan pembalasan di beberapa daerah. Karena masih ada PKL yang memelihara pusat PKL dan pusat PKL tidak dipromosikan dengan baik, ketepatan target juga kurang ideal, meskipun ketepatan lingkungannya baik. Salah satu masalahnya adalah minimnya kontribusi dari PKL dalam proses relokasi tersebut. Selain itu, retribusi juga belum ditetapkan, dan ketepatan sasaran belum tercapai sepenuhnya, terlihat dari masih adanya PKL yang tidak berpindah ke sentra relokasi serta promosi sentra yang kurang efektif. Sementara itu, ketepatan lingkungan sudah berjalan baik dari sisi internal, namun keterlibatan PKL dalam proses relokasi masih sangat minim.

No	Identitas (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
5	Anne Friday Safaria, Sri Sulmiati, dan Tintin Karwati (2020)	Implementasi Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Sumedang	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan relokasi PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Temuan-temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Mengurangi pengeluaran anggaran dan menjamin ketersediaannya untuk mendukung program adalah tujuan dari perubahan ini. Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penerapan peraturan daerah yang mengatur relokasi PKL. Keduanya juga berusaha untuk menilai keberhasilan kebijakan relokasi dan menentukan elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilannya.

Sumber: Olahan Penelitian (2025).

Berdasarkan data penelitian sebelumnya, kelima studi ini memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan penelitian sebelumnya berada pada pembahasan bagaimana upaya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung. Penelitian pertama berfokus pada pengaruh sosial ekonomi kebijakan relokasi Malioboro terhadap pedagang kaki lima. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro memberikan pengaruh positif dari sisi sosial, yaitu membuat tempat menjadi lebih rapi, teratur, indah, dan bersih. Suasana kawasan Malioboro terasa lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung. Namun, perubahan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti persaingan yang tidak seimbang antar pedagang. Pendapatan pedagang bervariasi tergantung lokasi lapak, di mana pedagang yang berada di tempat strategis mengalami peningkatan omset, sementara yang berada di lokasi kurang strategis mengalami penurunan. Secara sosial, relokasi memberikan rasa nyaman, aman, dan indah, namun penataan lapak antar pedagang masih belum optimal. Dari segi ekonomi, ketimpangan pendapatan antar pedagang dan persaingan yang tidak adil menjadi masalah yang muncul akibat relokasi.

Penelitian kedua fokus evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Skywalk Cihampelas pada periode 2017–2023. Berdasarkan data dan analisis, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu penataan kota yang lebih baik. Berdasarkan enam kriteria evaluasi (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), ditemukan bahwa:

1. Efektivitas: Kebijakan belum berhasil menertibkan PKL di trotoar Jalan Cihampelas, karena banyak PKL kembali berjualan di sana. Skywalk Cihampelas belum efektif sebagai solusi.
2. Efisiensi: Meski investasi besar dikeluarkan untuk pembangunan Skywalk, hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. PKL mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dan pengelolaan yang kurang serius.
3. Kecukupan: Kebijakan ini belum cukup memenuhi kebutuhan PKL, terutama dalam hal fasilitas dan dukungan. Skywalk Cihampelas belum menjadi tempat ideal untuk berjualan.
4. Pemerataan: Tindakan pemerintah di lapangan belum konsisten, membuat banyak PKL merasa dirugikan. Keterbukaan, pengawasan, dan komunikasi perlu diperbaiki.
5. Responsivitas: Meskipun kebijakan awalnya mendapat respons positif, keluhan dari PKL dan masyarakat muncul karena kurangnya respons dan tindak lanjut dari pemerintah terhadap masalah yang ada.
6. Ketepatan: Kebijakan relokasi melalui pembangunan Skywalk sudah tepat, tetapi manfaatnya belum dirasakan sepenuhnya oleh PKL. Revitalisasi dan penegakan aturan di Skywalk diperlukan untuk meningkatkan hasil.

Penelitian ketiga berfokus pada implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Serambi Ampel, Kota Surabaya. Implementasi menunjukkan bahwa relokasi berdampak signifikan sehingga menjadikan ruas jalan Kawasan religi ampel bersih dan tertib. Namun 43% pedagang tidak merasakan manfaat relokasi

Pada penelitian keempat berfokus pada implementasi kebijakan relokasi PKL dari trotoar di Kabupaten Sidoarjo ke Sentra PKL Gajah Mada. Salah satu temuan utama adalah bahwa kebijakan relokasi telah berjalan dengan baik dalam hal pengurangan jumlah PKL di trotoar. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas kebijakan, yaitu:

1. Kurangnya Ketepatan Target: Masih terdapat PKL yang meninggalkan sentra PKL, yang menunjukkan bahwa lokasi baru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka.
2. Minimnya Promosi Sentra PKL: Sentra PKL yang baru tidak dipromosikan secara optimal, sehingga kurang menarik bagi pelanggan.
3. Keterbatasan Partisipasi PKL: Minimnya keterlibatan PKL dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi mengurangi keberhasilan kebijakan.
4. Ketepatan Lingkungan Internal vs Eksternal: Dari sisi internal, kebijakan berjalan baik berkat dukungan otoritas lokal. Namun, secara eksternal, kontribusi PKL terhadap pelaksanaan kebijakan dianggap masih kurang.

Kemudian pada penelitian kelima, berfokus pada pelaksanaan kebijakan relokasi PKL oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Temuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Keberhasilan Parsial: Kebijakan relokasi berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya.
2. Kebutuhan Peningkatan Sumber Daya: Dibutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal.
3. Pengelolaan Anggaran: Efisiensi anggaran menjadi faktor penting untuk meminimalkan pengeluaran dan memastikan keberlanjutan kebijakan.

Kelima penelitian di atas memberikan wawasan yang berharga untuk memahami tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning. Beberapa pelajaran utama yang dapat diambil adalah:

1. Pentingnya Komunikasi dan Partisipasi: Sebagaimana ditunjukkan

dalam penelitian, keberhasilan relokasi sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah dan PKL, serta keterlibatan mereka dalam proses perencanaan.

2. Penyediaan Fasilitas yang Memadai: Lokasi relokasi harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan, seperti sanitasi, tempat parkir, dan akses yang mudah bagi pelanggan.
3. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya: Penelitian di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendukung implementasi kebijakan yang berkelanjutan.
4. Promosi Lokasi Baru: Penelitian di Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya promosi lokasi baru untuk menarik pelanggan dan memastikan keberlanjutan aktivitas PKL di tempat tersebut.

Kelima penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian tesis ini. Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Pada penelitian ini, focus objek dilakukan di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung dimana memiliki perbedaan geografis yang jelas dengan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan relokasi namun lebih spesifik di Pasar Bambu Kuning dengan karakteristik pasar dan pedagang yang berbeda dengan daerah lainnya.
3. Penelitian ini lebih menggali factor sosial ekonomi di Pasar Bambu Kuning
4. Penelitian ini melibatkan pendekatan partisipasi pedagang dan stakeholder lainnya dalam kebijakan relokasi Pasar Bambu Kuning.

Dengan mengintegrasikan temuan ini ke dalam konteks Pasar Bambu Kuning, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik untuk mendukung implementasi kebijakan relokasi PKL yang lebih efektif dan inklusif. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memilih judul **"Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar**

Bambu Kuning Bandar Lampung" karena peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan relokasi PKL di kawasan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap PKL dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning serta Mengevaluasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat di ketahui manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai implementasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks tata kelola PKL. Secara sosial membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi PKL sebagai pelaku ekonomi informal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial setelah suatu kebijakan disusun dan disahkan, di mana kebijakan tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyebut implementasi sebagai proses pelaksanaan tugas-tugas dan prosedur-prosedur administratif untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Sementara itu, menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Delarista dkk., 2025:194), implementasi adalah proses memahami apa yang terjadi setelah kebijakan disahkan, termasuk berbagai aktivitas administratif serta dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan secara tepat dan efektif.

Menurut Widodo (2002: 190) di dalam praktiknya kebijakan publik yang baik harus mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan memiliki sasaran atau difokuskan untuk mencapai sasaran.
- b. Tindakan atau pola perilaku pejabat pemerintah akan tercakup dalam suatu kebijakan.
- c. Sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukan sesuatu yang akan dilakukan.
- d. Sebuah kebijakan publik akan bersifat positif atau merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu. Juga bersifat negatif atau keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu

tindakan tertentu.

- e. Hukum dan peraturan selalu menjadi dasar kebijakan publik yang baik. Peraturan-peraturan ini bersifat otoritatif atau memaksa.

2.1.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur pelaksana, program yang akan diimplementasikan, dan kelompok sasaran merupakan tiga komponen implementasi kebijakan yang mutlak diperlukan (Abdullah, 1988:11; Smith, 1977 : 261).

1. Unsur Pelaksana

Unit-unit administratif atau birokratik ialah pihak yang paling utama mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) terhadap semua tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977:261) menyatakan —*implementing organization*l, yang berarti pelaksanaan kebijakan publik termasuk dalam birokrasi pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986:33) bahwa: *“Programs and policies are primarily implemented by bureaucracies, which also play varied roles in other phases of the policy-making process. Although they are not in charge, bureaucratic units are heavily involved in the creation of policies and programs as well as their legitimation”*. Hal ini menunjukkan bahwa divisi- divisi administratif ini memiliki peran hegemonik dalam menjalankan rencana dan program. Mereka juga memiliki peran yang luas dalam pembuatan dan keabsahan kebijakan dan program, tetapi mereka tidak dominan.

Menurut Sururi (2016:7), organisasi birokrasi atau administratif berperan sebagai saluran utama dalam pelaksanaan berbagai tugas administratif yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik. Organisasi ini memiliki keleluasaan dalam memilih alat yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Dengan otoritas serta kapasitas administratif yang

dimilikinya, organisasi birokrasi menjalankan beragam fungsi penting. Fungsi ini mulai dari penetapan tujuan dan sasaran organisasional, analisis dan perumusan kebijakan serta strategi, pengambilan keputusan, perencanaan dan penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga pengawasan dan evaluasi (Dimock & Dimock, 1984:117; Tjokroamidjojo, 1974:114; Siagian, 1985:69).

Dimock & Dimock (1984:117) menyatakan bahwa ilmu administrasi merupakan ilmu yang mempelajari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, hal ini berarti bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah para administrator di setiap unit administratif mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis dari proses perumusan kebijakan, kemudian ditetapkan kebijakan administratif yang dirancang sedemikian rupa agar tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Pawero (2021:22), perencanaan dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana rencana-rencana yang disusun merupakan hasil dari proses pemilihan dan pengembangan berbagai alternatif kebijakan. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana disesuaikan dengan kegiatan serta ruang lingkup kerja masing-masing entitas administratif. Rencana tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi program-program operasional yang harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penyusunan program, penting untuk merinci jenis-jenis kegiatan dalam bentuk deskripsi yang jelas, baik untuk setiap unit kerja maupun individu yang terlibat, guna memastikan kejelasan tanggung jawab dan alur pelaksanaan. Kebijakan administratif yang mencakup kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional

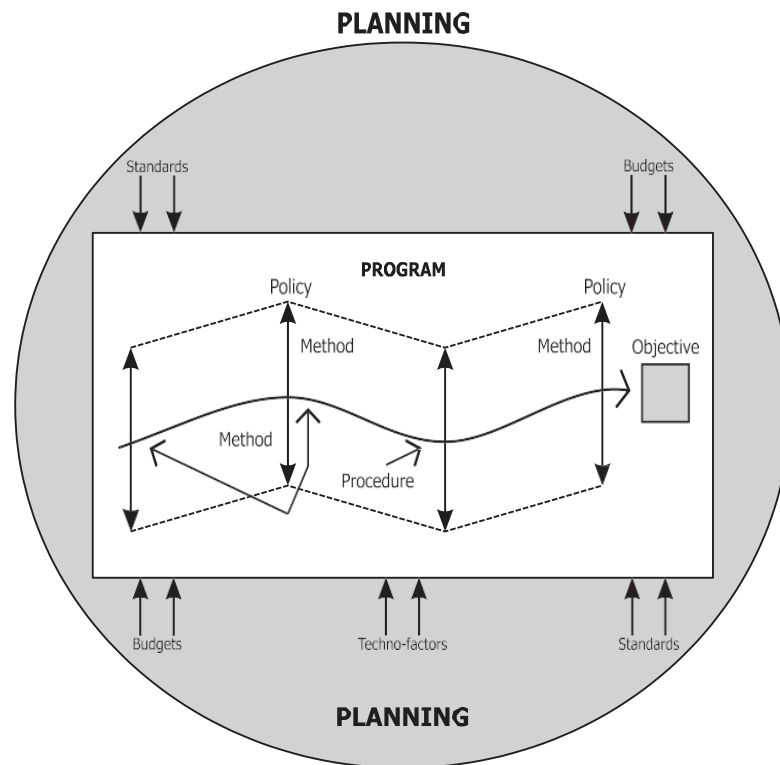
merupakan hasil dari tahap awal yang dijalankan oleh unit administratif. Selanjutnya, kebijakan tersebut dituangkan ke dalam program-program operasional yang membentuk struktur program secara menyeluruh (Lemay, 2002:33).

Tahap selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh administrator dari unit-unit administratif ialah pengorganisasian. Tindakan ini akan membentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Karena sumber daya manusia, peralatan, tugas, wewenang, akuntabilitas, dan proses kerja semuanya diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat dikerahkan untuk melakukan tugas. Sejalan dengan kegiatan ini, individu-individu tersebut harus terinspirasi untuk memiliki pola pikir dan dedikasi terhadap pelaksanaan program. Mengembangkan teknik dan protokol yang diperlukan, termasuk sarana untuk mengevaluasi hasil secara terus menerus, merupakan tahap terakhir bagi para administrator unit administrasi.

2. Unsur Program

Kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif jika kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan umum mengenai tujuan, sasaran, serta berbagai metode dikembangkan menjadi program-program operasional yang konkret (Subianto, 2020:17). Dengan demikian, pada hakikatnya, pelaksanaan kebijakan berarti pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan pernyataan Grindle (1980:6) yang menyatakan bahwa "*The collection of actions intended to put a program into action is called implementation.*" Program operasional yang baik adalah program yang mudah dipahami dan digunakan oleh para pelaksana, karena tidak hanya menguraikan tujuan pemerintah secara jelas, tetapi juga menjabarkan secara rinci alokasi sumber daya, metode dan prosedur kerja yang harus diikuti, serta standar yang berlaku. Terry (1977:253) menegaskan bahwa "*A program is a detailed plan that outlines how various resources will*

be used in the future in a coordinated manner and establishes the necessary steps and deadlines for each in order to accomplish certain goals.” Dengan kata lain, program merupakan rencana menyeluruh yang terintegrasi, mencakup sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran, yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.



Gambar 2. *The Meaning and Relationship of Selected Categories of Plans*
 Sumber : Terry, G. R., Principles of Management, 1977 : 242.

Pendapat serupa berkaitan diungkapkan oleh Siagian (1985 : 85) bahwa, program ini harus memiliki fitur-fitur berikut: (1) Tujuan yang ingin dicapai; (2) Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu; (3) Biaya dan sumbernya; (4) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan; dan (5) Jumlah karyawan yang dibutuhkan, serta kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan mereka.

Kemudian, Grindle (1980 : 11) mengungkapkan bahwa, konten dalam program harus mencakup : (1) *impacted interests*, (2) *benefits type*, (3) *anticipated change*, (4) *decision-making location*, (5) *program*

implementers, and (6) resources committed. Ini berarti program tersebut harus menggambarkan: (1) kepentingan yang terkena pengaruh oleh kepentingan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) status pembuat keputusan, (5) Siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digunakan.

Sejalan dengan penyusunan program di atas, untuk memudahkan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara efektif, yang kemudian dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menyajikan data anggaran. Program (urutan latihan pemecahan masalah) dapat dibagi menjadi beberapa tahap ke dalam kategori program, sub-kategori program, dan elemen program berdasarkan masalah utama yang muncul dan pentingnya penyelesaian di setiap unit administrasi (Zwick dalam Djamaludin, 1977 : 82 83).

Kategori program ialah struktur program menguraikan kerangka kerja mendasar yang mempertimbangkan penyelesaian masalah utama dengan sasaran serta skala prioritas operasional. Elemen-elemen program yang memberikan hasil yang sama atau sebanding dikelompokkan bersama untuk membentuk sub-kategori program, yang merupakan rincian dari kategori program. Operasi unit administratif yang secara langsung menghasilkan hasil fisik atau kumpulan output yang saling berhubungan dianggap sebagai elemen program. Oleh karena itu, komponen program merupakan blok bangunan fundamental dari struktur program.

Struktur program dapat dibagi ke dalam kategori berikut berdasarkan pengelompokan yang disebutkan di atas: Kategori Program Utama, Program Utama, Program/Kegiatan, dan Program Master, yang berfokus pada satu subjek utama. Setiap tugas dikonversi menjadi serangkaian tugas khusus untuk setiap unit kerja dan peserta implementasi. Oleh karena itu, arah umum, taktik, dan tujuan yang dikejar oleh setiap unit administratif dalam menangani isu-isu yang muncul serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat digambarkan atau tercermin dalam

struktur program. Secara logika, setelah identifikasi masalah dan pemilihan alternatif yang paling rasional untuk diajukan sebagai kebijakan puncaknya, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana-rencana, maka tahap implementasi itu akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut :

1. Membuat program, membagi tugas, menetapkan tujuan spesifik, dan memutuskan metrik untuk kinerja pekerjaan, biaya, dan waktu;
2. Menerapkan program ke dalam tindakan (mengaplikasikannya) dengan menggunakan struktur, staf, uang, dan sumber daya, proses, dan teknik yang tepat.
3. Menyediakan penjadwalan, monitoring, dan pengawasan serta penilaian (hasil) yang sesuai untuk penerapan kebijakan.

Uraian ini menunjukkan bahwa struktur dan isi program dapat digunakan untuk mengukur kualitasnya. Sementara isi program menunjukkan jumlah pekerjaan dan sumber dayanya, struktur program menggambarkan struktur masalah yang harus diselesaikan.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pengelompokan individu atau organisasi dalam masyarakat yang perilakunya akan dipengaruhi oleh kebijakan atau yang akan menerima produk dan layanan (Rayyan, 2020:65). Diharapkan bahwa mereka akan menerima dan beradaptasi dengan pola interaksi yang ditetapkan oleh kebijakan. Seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diterapkan bergantung pada seberapa sesuai isi program atau kebijakan dengan harapan mereka. Karakteristik kelompok sasaran, seperti besaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial- ekonomi, memengaruhi efektivitas implementasi. Mereka sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup, baik lingkungan sosial-budaya maupun geografis.

Selain itu, komponen komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran; oleh karena itu, kegagalan untuk menyebarkan isi kebijakan dengan cara yang efektif akan berdampak pada seberapa efektif pelaksanaan kebijakan negara. Isi kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran melalui berbagai cara yang sangat penting dalam hal ini.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan

Dengan menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu, pemahaman tentang implementasi kebijakan publik akan menjadi lebih mudah. Suatu model akan memberi kita gambaran lengkap tentang objek, situasi, atau proses. bagian apa pun yang ada pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana komponen berhubungan satu sama lain?

Model sistem implementasi kebijakan publik terdiri dari empat komponen: (1) program (kebijakan) yang dilakukan; (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau perkembangan; (3) unsur pelaksana, yaitu implementator, baik organisasi maupun individu, yang berkewajiban untuk mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi; dan (4) faktor lingkungan (politik, sosial, fisik, dan budaya).

Tidak nya satu model implementasi kebijakan publik; ada banyak berdasarkan kerangka berpikir pembuatnya. Dalam uraian yang akan datang, tidak akan dibahas semua jenis model, tetapi akan diuraikan beberapa yang dianggap cukup penting untuk dibahas.

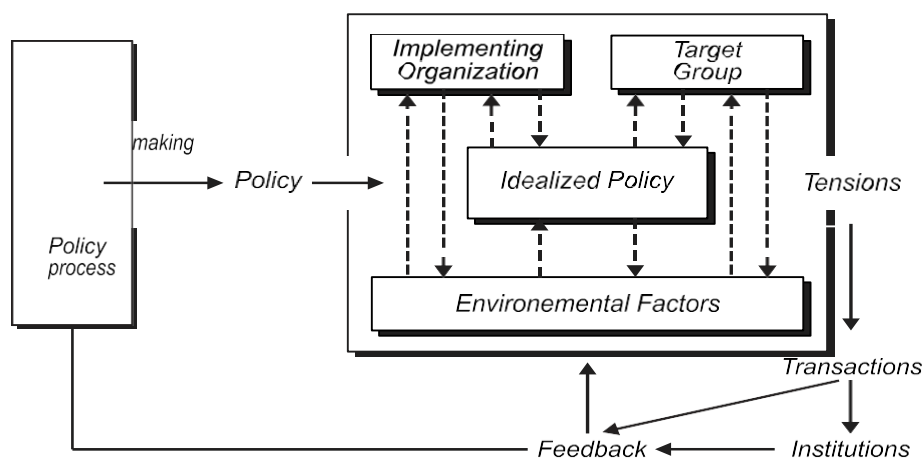
1. Alur Smith

Model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973:202-205). Menurut Smith, empat faktor harus dipertimbangkan selama proses implementasi. Keempat variabel tersebut tidak bekerja sendiri; mereka saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terjadi ketegangan dan ketegangan. Ketegangan ini dapat menyebabkan demonstrasi, bahkan tindakan fisik, yang memerlukan penegakan institusi baru untuk

mencapai tujuan kebijakan tersebut. Ketegangan juga dapat menyebabkan perubahan dalam institusi-institusi lingkungan.

Oleh karena itu, keempat variabel implementasi kebijakan menimbulkan ketidaksesuaian, ketegangan, dan tekanan-tekanan. Pola-pola ini mungkin menghasilkan pembentukan lembaga tertentu; namun, mereka juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan kembali ke matriks pola transaksi dan kelembagaan.

Keempat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut: (1) kebijakan yang diidealkan, atau kebijakan ideal; (2) kelompok sasaran, atau kelompok tujuan, yang merupakan orang atau kelompok yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi ideal yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) penerapan organisasi, pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan; (4) faktor lingkungan, yaitu komponen lingkungan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh penerapan kebijakan; ini termasuk elemen budaya, sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar 3. *A Model of The Policy Implementation Process*
Sumber : Smith (dalam Quade, 1977 : 261)

2. Marielee S. Grindle

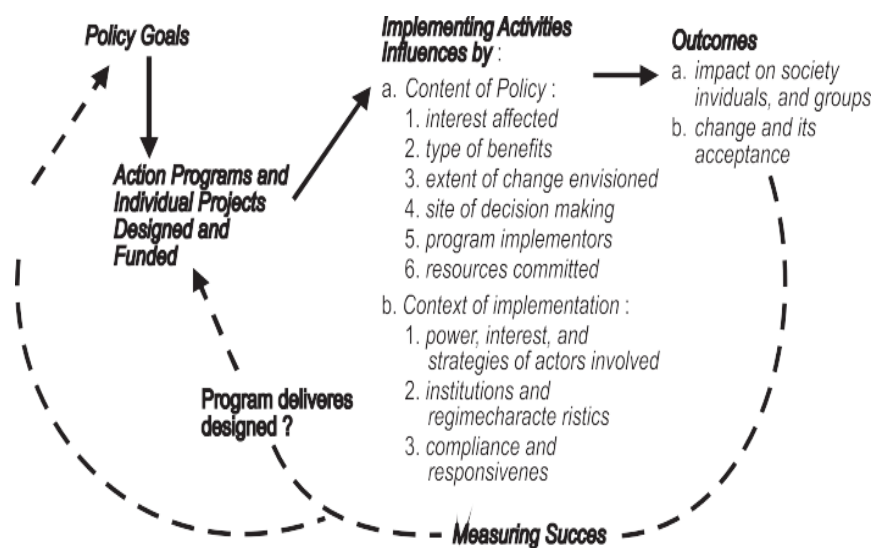
Merilee S. Grindle membuat model ini (1980) dengan erangka pemikiran yang didasarkan pada jawaban atas dua pertanyaan utama,

utamanya berkaitan dengan negara berkembang, bahwa kesuksesan implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kepraktisan kebijakan. Isi dan konteks adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Tabel 2. Derajat Implementability Dari Kebijakan

Content of Policy	Context of Implementation
• <i>Impacted interests</i> • <i>Benefits type</i> • <i>Anticipated change</i> • <i>Decision-making location</i> • <i>Program implementers</i> • <i>Resources committed</i>	• <i>Includes power, interest, and strategies of actors</i> • <i>Institution and regime characteristics</i> • <i>Conformity and responsibility</i>

Sumber; Merilee S. Grindle, (1980 : 11).



Gambar 4. Implementation as a Political and Administrative Process

Sumber : Merilee S. Grindle, (1980 : 11_

3. George Edwards III

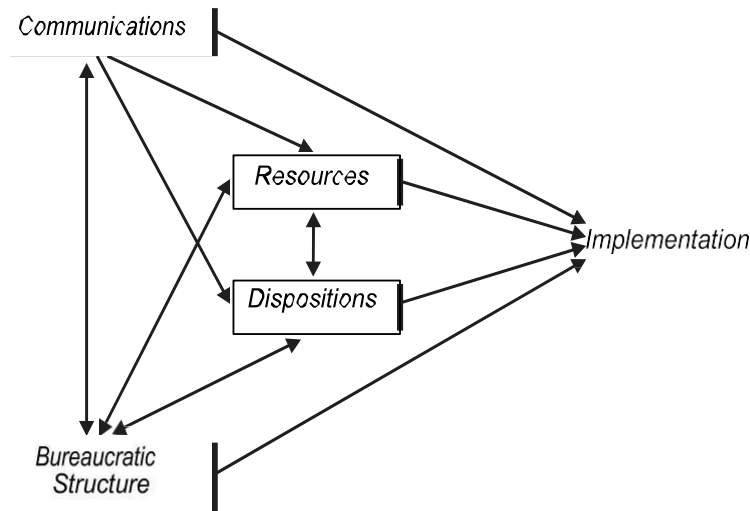
Berdasarkan model yang dikembangkan dan kerangka pemikiran George Edwards III (1980 : 10-11) kesuksesan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Communication*
2. *Resources*

3. *Dispositions*

4. *Bureaucratic Structure.*

Interaksi antara faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi. Gambar berikut menunjukkan model.



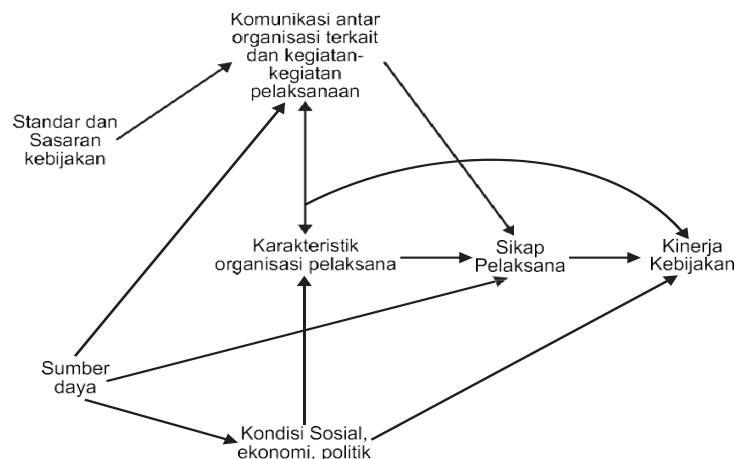
Gambar 5. *Direct and Indirect Impact on Implementation*
 Sumber : George Edwards III, 1980 : 14

Berdasarkan uraian model-model implementasi kebijakan di atas, pada penelitian ini didekati dengan model Merilee S. Grindle (1980), ini didasarkan pada fakta bahwa model Grindle berbeda dalam pemahamannya tentang konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan implementor, penerima implementasi, arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, dan kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, model Grindle yang relevan digunakan karena implementasi kebijakan yang berkaitan dengan relokasi pedagang kaki lima di berbagai tempat sangat rentan terhadap konflik antara pemerintah sebagai implementator dan pedagang kaki lima sebagai penerima.

4. **Van Metter dan Van Horn**

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Beberapa variabel bebas yang saling berkaitan memengaruhi

kinerja kebijakan, menurut model: Standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi dan kegiatan pelaksanaan organisasi terkait; perspektif pelaksana; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Model alur implementasi kebijakan Van Metter dan van Horn tersebut dapat disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. A Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn

Sumber: Metter & Horn, 1989.

Dalam model kebijakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu : (a) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) Karakteristik organisasi pelaksana; (d) Sikap para pelaksana; (e) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:142).

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Sejauh mana tujuan dan ruang lingkup kebijakan dapat dilaksanakan mengingat konteks sosiokultural saat ini di tingkat pelaksana kebijakan dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Akan sulit untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan jika ruang lingkup dan tujuannya terlalu ideal (utopis). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:164), kinerja kebijakan pada hakikatnya adalah evaluasi terhadap sejauh mana standar dan target tersebut telah dipenuhi. Tentu saja, hal ini dilakukan

untuk memverifikasi bahwa para pelaksana kebijakan telah memenuhi standar dan target tertentu.

Sangat penting untuk memahami tujuan dan kriteria kebijakan secara menyeluruh. Jika pihak berwenang tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai kriteria dan tujuan kebijakan, maka hal ini dapat menghambat keberhasilan pelaksanaannya. Sikap para pelaksana terkait erat dengan norma- norma dan tujuan kebijakan. Faktor penting lainnya adalah sikap para pelaksana terhadap tujuan dan standar kebijakan. Karena mereka menolak kebijakan atau tidak memahami tujuannya, para pelaksana mungkin tidak akan melaksanakannya (Van Mater & Van Horn dalam Agustino, 2006:164).

2. Sumber Daya

Kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang paling penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil diimplementasikan adalah manusia. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan, yang telah diputuskan secara apolitis, setiap langkah pelaksanaannya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu, uang, dan sumber daya manusia. Menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 2007:194):

Sumber daya komunikasi dan kebijakan sama pentingnya. Untuk membantu administrasi pelaksanaan suatu kebijakan, materi kebijakan ini juga harus dapat diakses. Sumber daya ini termasuk uang atau insentif lain yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan. Salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan adalah ketiadaan atau keterbatasan dana atau insentif lainnya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Baik kelompok resmi maupun kelompok informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan termasuk dalam fokus agen pelaksana. Hal

ini sangat penting karena sifat-sifat yang tepat dan kesesuaian dari agen pelaksana akan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan, karena kebijakan tertentu membutuhkan pelaksana kebijakan yang keras dan disiplin. Dalam situasi lain, agen pelaksana yang demokratis dan meyakinkan diperlukan. Selain itu, dalam memilih agen pelaksana kebijakan, cakupan atau wilayah juga merupakan faktor yang sangat penting.

4. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksana

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 2007:97), komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas implementasi diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik. Individu-individu (implementor) harus menyadari tujuan standar. Dalam situasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus menginformasikan kepada para implementor tentang standar dan tujuan tersebut. Ketika memberikan pengetahuan kepada para pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan, komunikasi dari beberapa sumber informasi harus terpadu dan konsisten.

Sulit untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan jika ada kejelasan, konsistensi, dan keseragaman. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diminta dari mereka dan apa yang harus dilakukan karena kejelasan ini. Sebagai contoh, komunikasi sering kali merupakan proses yang menantang dan rumit dalam organisasi publik seperti pemerintah kota. Entah disengaja atau tidak, berita dikirim melalui organisasi, dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan kepada para komunikator. Pelaksana kebijakan pada akhirnya akan merasa lebih sulit untuk melaksanakan kebijakan secara agresif jika beberapa sumber komunikasi menawarkan interpretasi yang bertentangan mengenai standar dan tujuan, atau jika sumber informasi yang sama menawarkan interpretasi yang saling bersaing.

Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para

pelaksana kebijakan sangat penting bagi kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan (Van Mater & Van Horn, dalam Widodo 2007: 97). Koordinasi juga merupakan alat yang ampuh untuk menjalankan kebijakan. Kesalahan akan berkurang jika semakin baik pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengkoordinasikan komunikasi mereka, dan sebaliknya.

5. Disposisi atau Sikap

Sikap penerimaan atau penolakan dari para agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik,¹¹ demikian pernyataan Van Metter & Van Horn (dalam Agustino, 2006:162). Hal ini sangat mungkin terjadi karena peraturan yang dibuat tidak disusun oleh warga setempat, yang sangat memahami permasalahan yang mereka hadapi. Namun, karena kebijakan publik biasanya bersifat *top-down*, maka sangat mudah bagi mereka yang membuat kebijakan untuk mempengaruhi kebutuhan, keinginan, atau masalah yang perlu ditangani. Perspektif mereka terhadap suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampaknya terhadap kepentingan mereka sendiri dan juga kepentingan organisasi mereka membentuk sikap mereka.

Kecenderungan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan penyaringan (*befiltered*) pada awalnya melalui persepsi implementor di dalam batas-batas implementasi kebijakan dijelaskan oleh VanMater & Van Horn (1974) dalam Agustino (2006:162). Kemampuan dan kemauan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga jenis elemen respon yang berbeda:

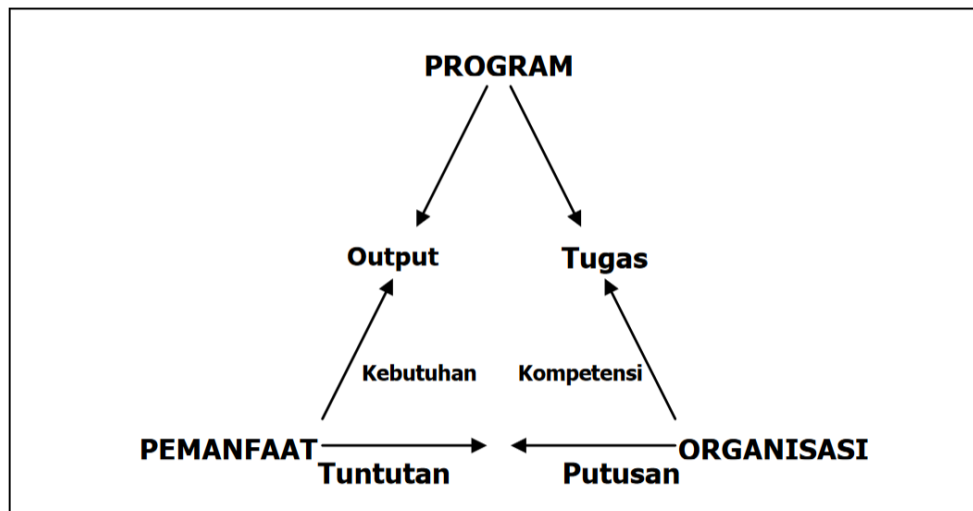
Pertama, aspek kognitif kebijakan, seperti pemahaman dan pengertian; kedua, arah respon, seperti penerimaan, netralitas, atau penolakan; dan ketiga, intensitas kebijakan. Sangatlah penting untuk memahami makna keseluruhan dari standar dan tujuan kebijakan karena, pada akhirnya, kegagalan para pejabat untuk memahaminya secara menyeluruh dapat

menghambat implementasi kebijakan yang tepat. sikap para pelaksana terhadap tujuan dan standar kebijakan. Selain itu, hal yang juga krusial adalah sikap para pelaksana terhadap tujuan dan standar kebijakan.

Karena mereka tidak setuju dengan tujuan kebijakan, para pelaksana mungkin tidak akan melaksanakan kebijakan tersebut. Di sisi lain, ada kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berhasil jika standar dan tujuan kebijakan diterima secara luas dan mendalam oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terakhir, kinerja kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat keparahan disposisi para pelaksana. Implementasi kebijakan dapat gagal karena ketiadaan atau rendahnya intensitas kecenderungan ini.

6. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendukung pencapaian kebijakan publik. Inisiatif implementasi kebijakan membutuhkan keadaan lingkungan eksternal yang mendukung karena konteks sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menimbulkan masalah dari kinerja implementasi kebijakan yang buruk. Keadaan yang mendukung ini memungkinkan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan terkendali.



Gambar 7. Model Kesesuaian

Sumber: (Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, 2000:19)

Menurut Korten, jika ketiga komponen implementasi program tersebut sesuai, maka program tersebut akan terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kesesuaian program dengan penerima manfaat, yaitu penawaran program dan kebutuhan populasi sasaran (penerima manfaat). Kedua, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian hubungan antara kelompok sasaran program dan organisasi pelaksana, khususnya kesesuaian kondisi yang telah ditentukan organisasi untuk mencapai hasil program.

Menurut Sururi dkk. (2023:24), berdasarkan desain yang dikemukakan oleh Korten, keberhasilan kinerja suatu program sangat bergantung pada kesesuaian tiga komponen utama dalam implementasi kebijakan. Pertama, output program harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, karena jika tidak, hasil program tidak akan memiliki manfaat yang nyata. Kedua, organisasi pelaksana harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang disyaratkan oleh program; tanpa kapasitas tersebut, output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan standar atau kebutuhan. Ketiga, kelompok sasaran juga harus mampu memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana, karena ketidakmampuan dalam memenuhi syarat tersebut akan menghambat penerimaan dan pemanfaatan hasil program. Dengan demikian, agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ketiga komponen kelayakan output, kapasitas organisasi pelaksana, dan kesiapan kelompok sasaran harus saling mendukung dan berada dalam kesesuaian yang harmonis.

Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1974) sangat cocok digunakan dalam penelitian mengenai kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung karena menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan melalui enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana. Keunggulan teori ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan faktor struktural dan perilaku, yang sangat relevan dalam konteks relokasi PKL yang sering kali menghadapi tantangan berupa resistensi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan sumber daya. Dibandingkan dengan teori implementasi lainnya seperti Mazmanian dan Sabatier yang cenderung berorientasi legal-formal dan *top-down*, teori Van Meter dan Van Horn lebih fleksibel dan kontekstual dalam menelusuri hambatan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, teori ini digunakan karena dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami secara mendalam dinamika, aktor, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan relokasi di lapangan.

2.2 Tinjauan Relokasi Pasar

2.2.1 Pengertian Relokasi Pasar

Menurut KBBI, relokasi adalah tindakan memindahkan atau mengalihkan

suatu usaha atau tempat usaha dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu. Tindakan pindah ke lokasi baru dikenal sebagai relokasi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam inisiatif revitalisasi adalah relokasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi adalah tindakan, proses, dan strategi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berkembang. Menciptakan pasar tradisional yang memiliki banyak kegunaan, seperti tempat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga, merupakan salah satu strategi untuk menghidupkan kembali atau membangun pasar tradisional yang baru (Setyaningsih, 2016). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat mendefinisikan relokasi sebagai proses pemindahan lokasi berdagang ke tempat yang lebih tertata dan nyaman sehingga usaha pedagang dapat berjalan lebih lancar.

2.2.2 Faktor Penentu Pemilihan Lokasi Perekonomian

Secara garis besar terdapat lima faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi suatu kegiatan ekonomi dan sosial, selanjutnya Sjafrizal (2016) menguraikan sebagai berikut:

1. Biaya Transportasi

Ketika memilih lokasi untuk kegiatan ekonomi, salah satu faktor atau variabel yang paling signifikan adalah biaya transportasi. Alasannya adalah karena biaya transportasi berperan besar dalam menentukan biaya produksi. Biaya pemindahan bahan baku dari sumbernya ke lokasi pabrik merupakan salah satu komponen yang membentuk biaya transportasi ini, begitu juga biaya pengiriman barang hasil produksi dari pabrik ke pasar. Sangat penting untuk mengelompokkan kedua aspek biaya transportasi ini karena variasi jarak dan biaya per ton kilometer akan mempengaruhi nilai budaya.

2. Upah yang Berbeda

Fakta bahwa upah tenaga kerja bervariasi berdasarkan geografi adalah kebenaran yang diakui secara luas. Variasi dalam biaya hidup, tingkat inflasi regional, dan susunan ekonomi masing-masing wilayah dapat berkontribusi terhadap perbedaan ini. Karena perbedaan dalam biaya

hidup, daerah pedesaan dan perkotaan dapat mengalami perbedaan tingkat upah antarwilayah ini.

3. Konsentrasi Permintaan

Di mana ada konsentrasi permintaan yang signifikan, pemilihan lokasi biasanya akan mengikuti. Hal ini sangat masuk akal karena prediksi penjualan perusahaan akan meningkat jika berlokasi di wilayah dengan konsentrasi permintaan yang tinggi.

4. Kompetisi Antar Wilayah

Para pelaku usaha harus menghadapi persaingan spasial ketika mempromosikan barang mereka. Persaingan antara pemilik bisnis yang memproduksi dan memasarkan produk yang sama di dalam suatu wilayah atau antar wilayah dikenal sebagai persaingan antar wilayah.

5. Harga dan Sewa Tanah

Pengusaha akan menggunakan lahan tersebut karena harga sewa lahan yang rendah yang ditawarkan oleh pemilik lahan dan harga sewa lahan yang mampu ia bayar. Pengusaha biasanya akan memilih lokasi di mana pemilik lahan lebih rendah daripada mereka yang memanfaatkan lahan yang dihasilkan untuk memaksimalkan pendapatan.

Berdasarkan uraian di tersebut, ada beberapa faktor ekonomi utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi; faktor-faktor ini harus diselesaikan agar aktivitas ekonomi tersebut berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran utama yang telah direncanakan oleh pelaku ekonomi.

2.2.3 Kendala Relokasi Pasar

Desain bangunan yang tidak sesuai dan masalah keuangan yang berkaitan dengan harga sewa ruang pasar, sehingga desain bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif serta tarif sewa yang memadai diperhitungkan jika pasar dipindahkan:

1. Tata letak yang menyeluruh dan pemisahan antara lokasi penjualan dan lokasi penjualan asli;
2. Banyak pedagang yang masih bertahan di lokasi berjualan lama karena

ragu untuk pindah ke lokasi yang baru;

3. Berdagang di badan jalan dan melakukan kegiatan yang merusak atau mengubah bentuk trotoar, bangunan umum, dan bangunan di sekitarnya;
4. Banyak pedagang yang enggan membangun bangunan baru karena dianggap tidak strategis dan jauh dari pembeli.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi menurut uraian di atas saat merelokasi atau memindahkan pasar, salah satunya adalah para pedagang enggan dipindahkan ke tempat relokasi, menganggap tempat itu tidak strategis, kurangnya fasilitas, dan sepi pembeli.

2.2.4 Tujuan Relokasi Pasar

Memfasilitasi pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pasar tradisional secara keseluruhan untuk berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.3 Tinjauan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni salah satu dari berbagai pelaku ekonomi pada sektor informal. Munculnya istilah PKL yaitu awal mulanya dari zaman Hindia Belanda yaitu pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles. Raffles membuat kebijakan tentang aturan yang mengharuskan pedagang informal menjaga jarak sejauh lima kaki dari gedung formal yang ada di pusat kota. Lima felet atau dapat diartikan sebagai akses pejalan, di pinggir jalan, dan seluas jalan kaki. Lalu area itu mengalami perkembangan dan dipakai sebagai area berjualan bagi pedagang kecil, pedagang yang menggunakan jalan tersebut dinamakan Pedagang Kaki Lima (Ardiyanto, 2008:8).

Sampai saat ini istilah PKL masih dimanfaatkan guna seluruh pedagang informal yang berdagang di sekitar jalanan, tergolong juga yang memiliki tempat usaha makanan yang tempatnya berbentuk tenda dengan mengurangi akses pejalan kaki atau akses motor dan mobil. Mulanya istilah kaki lima sudah ada dari jaman penjajahan kolonial Belanda. Kebijakan pemerintahan yang diberlakukan saat itu

yaitu semua jalan raya yang ada mengharuskan untuk penyediaan sarana bagi pejalan kaki. Artinya pemerintah setempat pada waktu itu sudah mengutamakan agar selalu menyediakan jalan bagi pejalan kaki.

PKL di berbagai tempat mengalami permasalahan karena dianggap dapat mengganggu pengendara bermotor, banyak orang yang berpendapat merasa tidak nyaman atas kehadiran para PKL yang dapat mengurangi jalan karena sebagian jalannya digunakan sebagai tempat PKL berniaga. Di sisi lain, beberapa PKL juga menyalahgunakan sungai serta saluran air yang paling dekat sebagai tempat sebagai pembuangan sampah hasil dari jualannya. PKL berjualan barang maupun makanan bersamaan pada harga yang relatif lebih terjangkau disandingkan toko yang berjualan secara formal. Hal tersebut karena biaya dan modal yang dikelularkan oleh PKL lebih kecil daripada toko formal. Dan target yang dicapai oleh para PKL yaitu kalangan menengah kebawah.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian teori tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn) dan untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian merancang kerangka pikir penelitian. Kerangka dasar pemikiran bermanfaat sebagai dasar dalam pengembangan beberapa konsep serta penggunaan teori pada penelitian. Selanjutnya kerangka pikir penelitian menjadi rujukan dalam merumuskan fokus penelitian yang melingkupi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn), diantaranya:

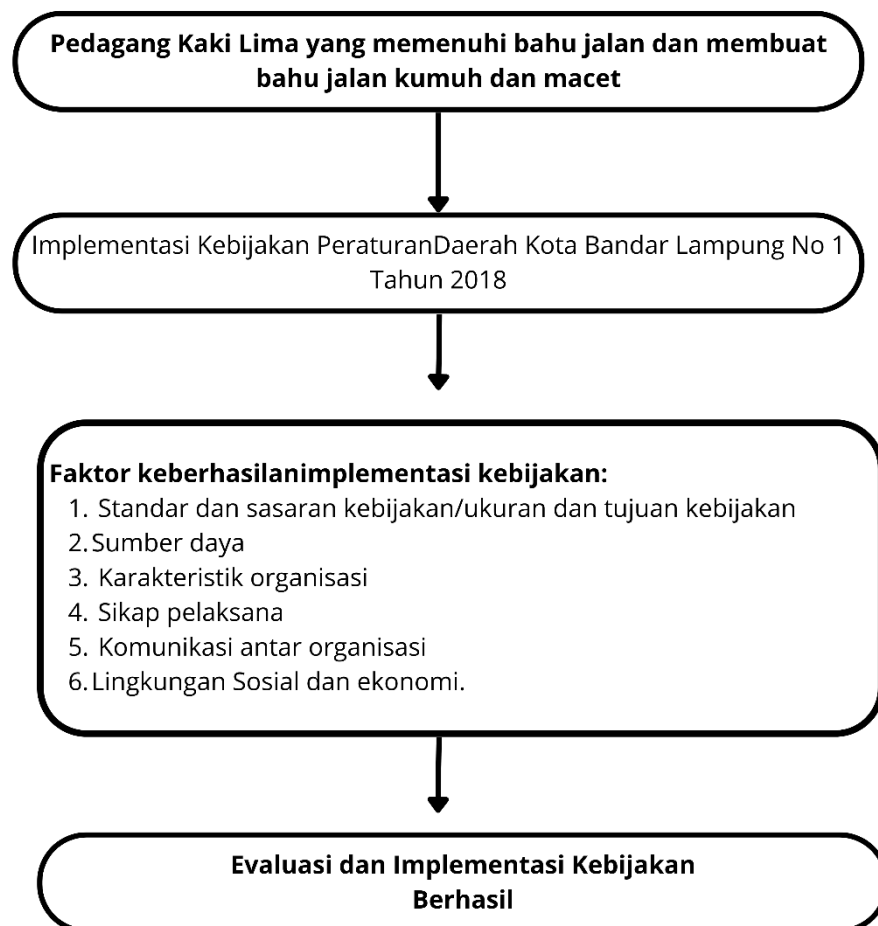
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Sikap para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Rumusan kerangka pikir penelitian merupakan sinkronisasi Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 yang merujuk kepada hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van

Horn). Kerangka pikir berguna untuk lebih mempermudah peneliti dalam memfokuskan proses pengumpulan data dan pembatasan data dan informasi penelitian yang akan difokuskan pada —Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampungl.

Lebih lanjut kerangka berfikir menjadi landasar pemikiran penulis yang bermanfaat sebagai penuntun serta petunjuk arah penelitian yang dituju. Berlandaskan teori yang sudah ada, maka kerangka dasar belrfikir yang dimanfaatkan guna studi ini ialah:

Gambar 8. Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Penelitian (2025).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Meneliti adalah aktivitas eksplorasi dengan tujuan memperluas pemahaman atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu melalui pendekatan ilmiah. Dalam konteks ini, metode penelitian mencakup pemahaman tentang teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian (Pahleviannur, 2022:82). Fokus penelitian ini tertuju pada eksplorasi dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berbasis filsafat yang digunakan untuk menyelidiki situasi ilmiah (eksperimen). Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada arti. Metodologi penelitian kualitatif menggunakan aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu atau kelompok untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian.

Studi dengan pendekatan kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu evaluasi yang tidak bergantung pada metode statistik atau perhitungan lainnya. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemahaman kejadian secara holistik dan kontekstual dengan pengumpulan data dan peneliti sebagai instrumen utama (Nugrahani, 2014:61). Dalam penelitian kualitatif, analisis tidak mengandalkan statistik atau metode kuantitatif. Fokusnya adalah memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara utuh, menggunakan gambaran atau deskripsi dalam wujud bahasa dan kata-kata, dengan konteks alamiah tertentu, dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Arikunto, 2010:3). Cara deskriptif analisis merupakan pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran atau

deskripsi terhadap objek penelitian dengan menggunakan data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan analisis data yang telah ada sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat meresapi konteks lokal di Kota Bandar Lampung, menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan dalam pengimplementasian kebijakan, respons yang diberikan para PKL dan pihak terdampak dari suatu kebijakan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif informan dalam konteks yang alamiah (Moleong, 2011:6).

Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif juga mencerminkan keinginan untuk memberikan kontribusi pada literatur akademis dengan memperkaya pemahaman teoritis tentang hambatan dalam pengimplementasi kebijakan publik, serta memberikan gambaran holistik mengenai dinamika pengimplementasian kebijakan publik yang berbasis pada kasus di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, metode kualitatif dipilih untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian yang mendalam dan kontekstual terhadap bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana respons para PKL dan pihak terkait terhadap kebijakan tersebut. Dengan peneliti sebagai alat utama, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Pemaknaan fokus penelitian dalam memandu jalannya suatu penelitian menjadi sangat penting. Fokus penelitian memiliki peran yang signifikan dalam mencegah peneliti terjebak dalam kelimpahan data, termasuk informasi yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan menetapkan fokus penelitian, peneliti dapat memberikan batasan yang jelas dalam proses studi dan pengumpulan data, memungkinkan mereka untuk memahami masalah penelitian secara terarah.

Desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini membahas, mengelaborasi, dan mendeskripsikan subjek yang diteliti (Arikunto, 2006:11). Salah satu jenis penelitian yang menggunakan metode atau strategi studi kasus adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji suatu objek spesifik secara sangat rinci dan memperlakukannya sebagai studi kasus. Semua pihak yang terlibat dapat menyediakan data studi kasus; dengan kata lain, penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1). Fenomena maupun kejadian dan bahkan praktik sosial menjadi fokus dalam penelitian umumnya mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan.

Pemilihan fokus studi ini adalah implementasi kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang melingkupi 6 variabel utama, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - a. Standar dan tujuan kebijakan:

Batasan dan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh kebijakan, termasuk ukuran keberhasilan yang dapat diukur.
 - b. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan:

Tingkat sejauh mana tujuan dan target kebijakan dipahami oleh pelaksana dan pihak terkait.
 - c. Relevansi standar dan tujuan kebijakan:

Kesesuaian tujuan kebijakan dengan permasalahan yang ingin diatasi serta kebutuhan masyarakat.
2. Sumber Daya
 - a. Ketersediaan anggaran:

Kecukupan dana untuk membiayai seluruh kegiatan dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan.
 - b. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja:

Kompetensi dan jumlah personel yang memadai untuk menjalankan kebijakan secara efektif.
 - c. Peralatan dan teknologi:

Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

d. Informasi dan data pendukung:

Kelengkapan dan akurasi data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e. Distribusi dan pengelolaan sumber daya:

Tata kelola dan pemerataan penggunaan sumber daya agar efektif dan efisien.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

a. Prosedur birokrasi:

Mekanisme kerja formal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Hierarki dan struktur organisasi:

Susunan jenjang dan pembagian tugas yang jelas dalam organisasi pelaksana.

c. Koordinasi antar unit:

Sinergi dan kerja sama antara bagian atau unit pelaksana kebijakan.

d. Fleksibilitas struktur birokrasi:

Kemampuan struktur organisasi beradaptasi terhadap perubahan dan situasi lapangan.

e. Pengelolaan dan pengawasan struktur birokrasi:

Mekanisme kontrol untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai rencana.

4. Disposition (Sikap Pelaksana)

a. Dukungan terhadap kebijakan:

Tingkat penerimaan dan persetujuan pelaksana terhadap kebijakan.

b. Motivasi pelaksana:

Dorongan internal untuk menjalankan kebijakan dengan optimal.

c. Komitmen pelaksana:

Kesungguhan dan konsistensi pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

d. Respon terhadap perubahan kebijakan:

Kemampuan dan kesiapan pelaksana dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru atau revisi.

e. Kemauan pelaksana untuk melakukan perbaikan:

- f. Keinginan untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan.
5. Komunikasi
- a. Kejelasan kebijakan:
Informasi kebijakan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaksana dan pihak terkait.
 - b. Konsistensi dalam komunikasi:
Keseseragaman pesan yang disampaikan agar tidak menimbulkan interpretasi ganda.
 - c. Saluran komunikasi yang efektif:
Media atau jalur komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi.
 - d. Feedback dari pelaksana kebijakan:
Masukan dan tanggapan dari pelaksana sebagai bahan evaluasi kebijakan.
 - e. Minimnya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan:
Rendahnya tingkat misinterpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
- a. Efek lingkungan sosial:
Pengaruh nilai, norma, budaya, dan interaksi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.
 - b. Efek lingkungan ekonomi:
Kondisi ekonomi daerah yang dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan kebijakan.
 - c. Efek lingkungan politik:
Stabilitas dan dukungan politik yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan.

3.3 Penentuan Informan

Pemilihan informan secara purposive, di mana peneliti memilih informan terlebih dahulu dan juga mengungkapkan status individu mereka, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian, informan adalah orang-orang yang memberikan informasi berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan adalah orang-orang dalam lingkungan penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi

mengenai keadaan dan kondisi lingkungan penelitian, menurut Moelong (2013:132).

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Posisi/Jabatan	Alasan Pemilihan
1.	Drs. Farid Yanuza, M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	Sebagai pelaksana utama kebijakan pengelolaan pasar dan relokasi PKL.
2.	Prof. Dr. Syarief Makhya	Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	Sebagai Pemerhati Kebijakan Publik di Universitas Lampung
3.	Rizal Andreas, S.E	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Sebagai pelaksana utama penertiban dan relokasi PKL.
4.	Lastri	Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning	Sebagai subjek utama terdampak langsung dan tidak setuju (Kontra) kebijakan relokasi.
5.	Nuraida	Pedagang Ruko	Memberikan perspektif terhadap dampak PKL bagi pedagang pasar formal di kawasan ini (Pihak yang Pro Relokasi).

Sumber: Olahan Penelitian (2025).

Peneliti memfokuskan informan pada pihak yang terlibat langsung dalam mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan dari tim sukses dan relawan, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kebijakan relokasi PKL di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung.

3.4 Sumber Data

Sekumpulan kejadian atau peristiwa yang belum melalui proses pengolahan, seringkali sulit dipahami oleh peneliti, sehingga diperlukan pengolahan untuk menjadi informasi yang memiliki makna disebut data. Jenis data mencakup kata, suara, karakter, simbol, atau angka yang dapat diolah menjadi pengetahuan. Sumber data pada studi ini dapat dikategorikan menjadi data primer dan sekunder (Sugiyono, 2015).

1. Data Primer

Data ini ialah informasi paling utama yang didapat secara langsung dari asalnya di lokasi penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Informasi yang didapat langsung dari hasil tanya jawab lebih dalam, pengamatan, dan interaksi dengan narasumber di tempat penelitian. Data yang dihasilkan dari data primer berupa hasil wawancara dengan pedagang dan pemangku kebijakan, observasi lapangan, survei, dokumentasi kebijakan, serta data keuangan pedagang sebelum dan setelah relokasi.

2. Data Sekunder

Merupakan informasi yang diperoleh dari rujukan lainnya berupa dokumen (brosur, literatur, serta tulisan para ahli) yang diyakini relevan dengan isu penelitian. Data sekunder juga bisa didapat dari proses belajar-mengajar serta berbagai dokumen yang berupa data pendukung. Data sekunder yang dihasilkan berupa dokumen kebijakan relokasi, laporan pemerintah atau instansi terkait, statistik pasar dan ekonomi daerah, serta penelitian atau studi sebelumnya yang relevan mengenai kebijakan relokasi pedagang kaki lima dan dampaknya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data memegang peranan yang sangat krusial karena esensi dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Proses pengumpulan data dilaksanakan guna memperoleh informasi yang diperlukan demi menunaikan sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data berikut digunakan oleh peneliti dalam upaya memperoleh informasi seakurat mungkin mengenai variabel yang diteliti:

1. Tanya Jawab

Tanya jawab merupakan bentuk pembicaraan dengan suatu tujuan, melibatkan sepasang individu, ialah pewawancara yang memberikan pertanyaan dan informan yang menjawab. Menurut

Lincoln dan Guba tujuan tanya jawab mencakup konstruksi informasi tentang seseorang, fenomena, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan aspek lainnya (Moleong, 2017:186). Tanya jawab dapat dianggap sebagai obrolan yang melibatkan seni meminta keterangan dan menyimak, meskipun tidak bersifat netral dalam menghasilkan realitas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Wawancara digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman situasional dari episode interaksi yang spesifik, dan metodenya dipengaruhi oleh karakteristik personal peneliti, seperti ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009:95). Dalam pengertian lain, wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dan informan, terjadi dalam bentuk tatap muka sehingga ekspresi wajah dan gerakan tubuh responden menjadi bagian dari komunikasi bersamaan dengan kata-kata verbal yang disampaikan (Gulo, 2002:116). Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan mengharapkan mendapatkan informasi mengenai fenomena yang terjadi, dilakukan oleh pewawancara dan informan yang diwawancarai.

2. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengenali atau memeriksa perilaku nonverbal. Sugiyono (2018:229) menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang berbeda dari metode lain dalam beberapa hal. Selain individu, berbagai objek alami juga diamati. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi dinamika sosial. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, untuk mengetahui permasalahan relokasi pedagang di Pasar Bambu Kuning. Yusuf (2013:384) menegaskan bahwa ketika peneliti melihat dan mendengar objek penelitian sebelum menarik

kesimpulan dari apa yang diamati, peneliti memainkan peran utama dalam menentukan efektivitas observasi sebagai strategi pengumpulan data. Mereka yang mengajukan pertanyaan dan memahami hubungan antara berbagai aspek objek yang diteliti adalah mereka yang memberikan makna pada apa yang mereka lihat di dunia nyata dan dalam konteks alaminya.

3. Studi Dokumentasi

Peraturan, buku-buku terkait, laporan kegiatan, video dokumenter, foto, dan data atau informasi relevan lainnya dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian menggunakan dokumentasi. Catatan kejadian masa lalu disebut dokumen. Penerapan studi dokumen melengkapi metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Peneliti memilih metode pengumpulan data melalui dokumentasi karena dokumen menjadi bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga berfungsi sebagai referensi untuk melihat data- data mengenai fenomena yang telah diabadikan dalam waktu yang relatif singkat

3.6 Teknik Pengolahan Data

Langkah berikutnya setelah data didapatkan atau terkumpul adalah pengolahan data. Menurut Efendi dan rekan-rekan (Singarimbun, 2008:43) teknik pengolahan data melibatkan:

1. Editing

Dilakukan dengan memeriksa ulang informasi yang sudah terkumpul, tujuannya adalah untuk memastikan validitasnya dan menyiapkannya untuk tahap berikutnya. Pada proses ini, peneliti mengolah data setelah tanya jawab dengan menyesuaikannya dengan pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara, serta memilih dan menentukan data yang relevan Untuk penelitian. Di sisi lain, dalam kegiatan pengamatan, peneliti menghimpun data yang signifikan dari hasil pengamatan agar bisa disajikan secara efektif.

2. Interpretasi

Pada tahap ini, penilaian seperti temuan studi diambil dari interpretasi data yang disajikan dalam narasi dan tabel. Penyajian data yang berasal dari data pribadi merupakan langkah selanjutnya dalam proses interpretasi, di mana peneliti memilih kata dengan cermat untuk menghindari kesan yang mungkin merugikan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian secara menyeluruh diuraikan dalam lampiran, dan penentuan lampiran disusun agar sesuai dengan temuan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan & Biklen (Moleong, 2017:248), merupakan upaya untuk bekerja dengan data, mengorganisir, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mengetahui hal-hal yang penting, dan memusatkan pada apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebaliknya, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998:249) melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Merekam informasi yang berasal dari catatan lapangan dan memberikan kode untuk memastikan sumber data tetap dapat diidentifikasi.
2. Menghimpun, menyaring, mengklasifikasikan, mensintesis, merangkum, dan membuat indeks.
3. Menganalisis, dengan membuat kategori data yang bermakna, menemukan pola serta hubungan, dan menghasilkan temuan umum.

Tujuan dari melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan informasi yang terkandung dalam data, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Di dalam konteks penelitian yang di tulis peneliti, analisis data dilaksanakan dengan menggambarkan, menngolah, dan mengartikan hasil penelitian melalui penyusunan kalimat dan kata-kata sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang diteliti. Cara analisis data yang dapat digunakan mencakup prosedur reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh konsep (Milles dan Huberman, 1992:16).

A. Minimalisasi Data

Minimalisasi data merujuk pada fase di mana data asli yang berasal dari dokumentasi lapang dipilih, difokuskan, disederhanakan, diabstraksi, dan diubah. Proses ini merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, membimbing, mengeliminasi yang tidak relevan, serta mengatur data agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi (Rezkie, 2020). Melalui ringkasan dan klarifikasi berdasarkan penekanan masalah dan fitur yang diteliti, metode reduksi data memudahkan interpretasi informasi yang diperoleh dari catatan lapangan. Peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengeliminasi informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian (Rezkie, 2020:32).

B. Display (Penyajian Data)

Sejumlah data yang terstruktur memiliki potensi untuk membantu dalam menarik kesimpulan dan menerapkan langkah-langkah tindakan yang diperlukan. Informasi yang ada dikelompokkan ke dalam bagian atau sub-bagian yang sesuai. Penyajian data disesuaikan dengan catatan tertulis yang terdapat dalam lapangan. Sebagai contoh, data yang mendukung penelitian dapat berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan. Informasi krusial yang terdokumentasi di lapangan kemudian disampaikan dalam bentuk teks deskriptif agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Langkah selanjutnya dalam penyajian data oleh peneliti adalah menghadirkannya dalam bentuk tabel, dengan maksud tujuan untuk mengintegrasikan informasi yang terstruktur secara komprehensif (Rezkie, 2020:32).

C. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah verifikasi, ketika data diperiksa untuk memastikan keandalannya (konsistensi), objektif, dan

memiliki validitas internal dan eksternal (kebenaran dan penerapan). Kesimpulan hanya dapat dibuat setelah data memenuhi kriteria tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian, kesimpulan ini bertujuan untuk menyelidiki makna dan menawarkan justifikasi yang disarankan untuk pemahaman (Rezkie, 2020:33).

Pada proses verifikasi data, peneliti memanfaatkan pendekatan penelitian yang konsisten dengan data yang telah melalui proses display data. Data yang diperoleh dan dianalisis oleh peneliti disusun kembali dengan penggunaan teori yang telah digunakan guna menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian. Para peneliti meninjau data yang telah diringkas dan disajikan, lalu membuat inferensi. Data lapangan mentah pertama-tama dicatat, kemudian diubah ke dalam bentuk dan klasifikasi yang tepat untuk memulai proses pemrosesan data yang lengkap. Setelah proses reduksi dan modifikasi agar selaras dengan tujuan penelitian, data diperiksa, divalidasi, dan akhirnya, ditarik kesimpulan (Rezkie, 2020:33).

3.8 Teknik Validasi dan Keabsahan Data

Untuk menjamin kevalidan data dalam penelitian kualitatif, perlu memenuhi beberapa kriteria yang diuraikan oleh (Moleong, 2014:87). Kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah derajat kepercayaan (credibility). Penetapan derajat kepercayaan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik pemeriksaan, salah satunya merupakan triangulasi. Triangulasi adalah cara pemeriksaan kevalidan data yang menggunakan elemen di luar data sebagai pembanding atau pengecek. Ada tiga jenis triangulasi menurut Denzin (Patton, 2015:83), yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

Triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, penyidik, dan teori. Tujuan utama dari triangulasi data adalah untuk memeriksa kevalidan data dengan

memanfaatkan elemen di luar data itu sendiri sebagai pembanding atau pengecek. Salah satu jenis triangulasi adalah triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan dan pemeriksaan derajat kepercayaan informan yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda. Misalnya, peneliti dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, atau membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi. Pendekatan ini juga mencakup membandingkan pandangan orang tentang situasi penelitian dan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

Selain itu, triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data untuk mengkaji fenomena yang sama, seperti menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Dengan menggunakan berbagai metode, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi teori, di sisi lain, memanfaatkan beberapa perspektif dan teori untuk menafsirkan data. Dengan melihat data dari sudut pandang teori yang berbeda, peneliti dapat memahami fenomena dengan lebih komprehensif dan mendalam. Dengan menerapkan berbagai jenis triangulasi ini, peneliti dapat meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil penelitian mereka.

Triangulasi berdasarkan sumber melibatkan perbandingan dan pemeriksaan derajat kepercayaan informan yang melibatkan waktu dan alat berbeda secara penelitian kualitatif. Beberapa pendekatan dapat digunakan, seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi, membandingkan pandangan orang tentang situasi penelitian, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait (Murdiyanto, 2020:67).

Kriteria kedua adalah keteralihan (*transferability*), yang mengharuskan peneliti melapor hasil penelitian secara teliti dan secermat berdasarkan

hasil yang tepat agar dapat dipahami konteks lokasi penelitian dilakukan. Uraian harus spesifik agar dapat dipahami, dan temuan harus diinterpretasikan dalam bentuk uraian rinci (Murdiyanto, 2020:67). Kriteria ketiga adalah kebergantungan (*dependability*), yang setara dengan reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Kebergantungan mencakup pengulangan studi dalam kondisi serupa dan memastikan hasil yang esensialnya sama untuk mencapai reliabilitas. Kriteria keempat adalah kepastian (*confirmability*), yang dalam penelitian kualitatif setara dengan objektivitas. Pengujian kepastian mirip dengan uji kebergantungan, dan hasil penelitian dianggap objektif jika disetujui oleh banyak orang. Pemeriksaan keaslian data memakai triangulasi berdasarkan sumber, yang melibatkan perbandingan data yang diperoleh melalui wawancara antara informan yang memiliki perbedaan. Peneliti dapat menggunakan variasi pertanyaan, memeriksa data dengan berbagai sumber, dan menerapkan berbagai metode untuk memastikan kepercayaan data (Murdiyanto, 2020: 68).